

PROBLEMATIKA PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH ACEH TENGAH

Yanni Syarienda^{*1}, Hasan Basri², Heru Fahlevi³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, dan Pemda Aceh Tengah

²³ Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Korespondensi Penulis:

¹s.yanni83@gmail.com, ²P_haasan@yahoo.com, ³hfahlevi@unsyiah.ac.id

Abstract

The present study has the objective to analyze the problems in the application of accrual-based accounting at the local government of the Central Aceh. This research is also aimed to find out the strategic steps carried out by the local government in handling the problems of application of accrual-based accounting - by means of conducting a case study at Central Aceh Regional Government. The method employed in this research was qualitative method with case study approach. The results demonstrated that the application of accrual-based accounting at the Central Aceh Regional Government has been supported by the presence of regulations (Qanun) of the Central Aceh Regency on the accounting policy and SAP(Standar Akuntansi Pemerintahan) procedural system at Central Aceh Regency; followed by the socialization at the beginning of this application, which is then supported by the information technology. What become the problem here the insufficient Human Resources (HR), either in terms of experience or educational backgrounds at the Office of Central Aceh Regional Financial Management. Subsequently, the Central Aceh Regional Government, via the Office of Central Aceh Regional Financial Management, took the strategic steps to overcome the problems in the application of accrual-based accounting through: (1) special training, (2) funding/ budgeted expenditures, and (3) supportive information technology and systems.

Keywords: *Accrual problems, Strategic steps, Accrual basis*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah penerapan akuntansi berbasis akrual dengan mengambil studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemda Kabupaten Aceh Tengah telah di dukung dengan adanya qanun/peraturan Bupati Aceh Tengah mengenai kebijakan akuntansi dan sistem prosedur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian adanya sosialisasi di awal penerapan akuntansi berbasis akrual ini, yang kemudian di dukung dengan adanya teknologi informasi. Yang menjadi permasalahan disini yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai baik dari segi pengalaman maupun dari latar belakang pendidikan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah mengambil langkah strategis untuk mengatasi permasalahan penerapan akuntansi berbasis akrual ini melalui: (1) pelatihan khusus, (2) pendanaan/biaya yang sudah dianggarkan dan (3) teknologi dan sistem informasi yang mendukung.

Kata kunci: Permasalahan akrual, Langkah strategis, AkruaI basis

PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik pada tahun 1980-an terjadi di negara-negara industri maju. Berbagai perubahan dilakukan, diantaranya dengan mengadopsi pendekatan *New Public Management* (NPM) dan *Reinventing Government* di banyak negara terutama negara Anglo Saxon (Sancoko, 2008). NPM berakar dari teori manajemen yang pada dasarnya beranggapan bahwa praktek bisnis komersial dan manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktek dan teknik manajemen yang diterapkan di sektor swasta ke dalam sektor publik (Mardiasmo, 2002). Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik kemudian mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Sebagai contoh terjadinya perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual. Perubahan akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual merupakan bagian penting dari reformasi sektor publik di negara-negara Anglo Saxon. Pemerintah Selandia Baru yang dianggap paling maju dan sukses dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual telah mengadopsi sistem akuntansi tersebut sejak tahun 1991, sebagai negara pertama di dunia yang mengadopsi sistem akuntansi berbasis akrual, yang kemudian diikuti oleh Jepang, Italia dan negara-negara Eropa lainnya meskipun di Italia sistem tersebut tidak berjalan efektif. Tujuan memperkenalkan sistem akuntansi akrual adalah membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektivitas sektor publik (Hyndman dan Connolly, 2010).

Pasca krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1998, reformasi yang terjadi di berbagai bidang membawa perubahan yang besar, termasuk pada bidang keuangan negara. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan (Priyono, 2012). Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Sebelum era reformasi pengelolaan keuangan negara sistem pencatatan pada akuntansi di sektor pemerintahan masih menggunakan *single entry*. Dalam perkembangannya sistem pencatatan akuntansi dari basis kas berubah menjadi akuntansi berbasis akrual.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya

dicatat. Dampak positif dari penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah banyak diakui oleh para peneliti. Seperti kajian yang dilakukan oleh Deloitte (dalam Asfiansyah, 2015), yang menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara signifikan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan, serta meningkatkan alokasi sumber daya dengan menginformasikan besarnya biaya yang ditimbulkan dari suatu kebijakan dan transparansi dari keberhasilan suatu program.

Perubahan paradigma sistem pencatatan pada pemerintah baik pusat maupun daerah dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mewajibkan setiap entitas pemerintahan melaksanakan Standar Akuntansi yang berbasis akrual. Kemudian Permendagri menerbitkan regulasi bagi pemerintah daerah yaitu Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis AkruaI di Pemerintah Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam penerapan akuntansi akrual pada pemerintah daerah dan untuk mengetahui strategi yang dilakukan Pemda Aceh Tengah dalam mengatasi masalah penerapan akuntansi berbasis akrual.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pemda Aceh Tengah sebagai masukan dan sumber informasi mengenai penerapan akuntansi akrual, permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diambil dalam mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan dalam mendukung pelaksanaan PP 71 tahun 2010 dan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah

Pembahasan selanjutnya penelitian ini dimulai dengan kajian pustaka yang berhubungan dengan akuntansi berbasis akrual. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan metode penelitian yang digunakan selanjutnya diikuti dengan pembahasan hasil penelitian, dan diakhiri dengan menyajikan kesimpulan penelitian.

TINJAUAN TEORETIS

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu subsistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah didefinisikan sebagai “sistem akuntansi yang meliputi proses

pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum”.

Basis akrual dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa “basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar”. Kemudian Halim dan Kusufi (2012) memberikan kesimpulan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, yang mana tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan.

Basis akrual atau *accrual basis* pada dasarnya adalah suatu metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi. Dengan demikian pencatatan dalam metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan. Hal yang penting adalah ketika transaksi terjadi langsung dicatat, karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar di masa depan. Transaksi di catat pada saat terjadi, walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana (Beechy, 2007).

Manfaat basis akrual secara nyata dirasakan dalam menyajikan informasi atas seluruh aktivitas yang terjadi. Widjajerso dalam Sari dan Putra (2012:4) memaparkan alasan penerapan basis akrual pada sektor pemerintahan, diantaranya: (1) Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya informasi tentang hutang dan piutang untuk pengambilan keputusan ekonomi, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan, (2) Hanya akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya, (3) Hanya akuntansi berbasis akrual yang dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban, dan (4) Hanya akuntansi berbasis akrual yang menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang pemerintah, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di laporan berbasis kas.

Beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual (Blondal, 2003), yaitu: (1) Persiapan dalam perubahan budaya entitas pemerintah, (2) Pemilihan model implementasi, (3) Membutuhkan komunikasi, (4) Keahlian akuntansi, dan (5) Pemilihan *IT Based System* (sistem teknologi informasi).

Indonesia merupakan negara berkembang dan penerapan basis akrual dalam sistem akuntansi pemerintahan suatu negara bukan suatu hal yang mudah terutama bagi negara berkembang. Berikut

rekomendasi ADB (*Asian Development Bank*) penerapan basis akrual bagi negara berkembang: (1) Kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan basis akrual, (2) Komitmen politik merupakan salah satu kunci penting, (3) Tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan, (4) Perlunya tenaga akuntan yang andal, (5) Sistem informasi akuntansi harus memadai, (6) Badan audit tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat, (7) Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

PP No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah “standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD”. Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar.

Sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan SAP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Perbedaan fundamental Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan.

Perbedaan antara Standar Akuntansi Pemerintahan *Cash Toward Accrual (CTA)* dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dapat digambarkan pada Tabel 1.

Tabel 1
Perbedaan (Standar Akuntansi Pemerintahan *Cash Toward Accrual (SAP CTA)* dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrual

No	Pembeda	SAP CTA	SAP Akrual
1	Jenis Laporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lap. Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Lap. Arus Kas (LAK) 4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lap. Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. LAK 4. CALK 5. Lap.Operasional (LO) 6. Lap.Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 7. Lap.Perubahan Ekuitas
2	Pengakuan Pendapatan	Pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah (RKUN/D) (kecuali satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU))	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan-LO pada saat hak timbul dan atau adanya aliran sumber daya ekonomi 2. Pendapatan-LRA pada saat kas diterima di RKUN/D
3	Pengakuan Belanja	Pada saat kas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beban pada LO, saat kewajiban

		dikeluarkan dari RKUN/D (kecuali satuan kerja BLU)	timbul, konsumsi aset atau penurunan manfaat ekonomis/potensi jasa 2. Belanja pada LRA, saat pembayaran kas keluar dari RKUN/D
--	--	--	---

Sumber: Yafie (2013)

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah masih terdapat berbagai masalah dalam implementasinya. Penelitian Surepno (2015), pada Pemerintah Kota Semarang telah berhasil menerapkan akuntansi berbasis akrual yang didukung oleh empat strategi utama, yaitu komitmen pimpinan, pengembangan regulasi, pengembangan sistem informasi dan pengembangan sumber daya manusia. Akan tetapi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual tersebut masih menemui hambatan dalam penerapannya, yaitu masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), dukungan teknologi informasi belum memadai, permasalahan aset tetap dan belum adanya petunjuk teknis bagi Pemerintah Daerah (Pemda).

Demikian juga pada penelitian Widianti, *et al.* (2016) menemukan permasalahan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Tegal, bahwa tingkat pendidikan staf, pelatihan staf keuangan, kualitas teknologi informasi dan pengalaman berpengaruh secara simultan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktifitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Creswell, 2013).

Studi kasus dipilih dalam penelitian ini dikarenakan studi kasus memiliki kelebihan yaitu studi kasus dapat membawa peneliti dalam pemahaman mengenai isu atau fenomena atau objek yang kompleks dan *complicated*. Kemudian peneliti juga diuntungkan dengan memperoleh pengetahuan yang luas dan holistik mengenai kekurangan dan kelebihan dari penelitian sebelumnya. Studi kasus menekankan pada analisis detail yang bersifat kontekstual dari beberapa kejadian dan kondisi yang terbatas serta bagaimana hubungan keduanya dapat saling mempengaruhi (Yin, 2003).

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang tingkat validitasnya dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan sumber dan metode pengumpulan data yang kredibel.

Menurut Sugiono (2010) terdapat beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam (*indepth interview*) kepada informan yang terlibat dan terkait langsung dan dilakukan perekaman suara pada saat wawancara berlangsung. Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang dari bidang akuntansi, yaitu Kepala Bidang, Kepala seksi dan staf. Kemudian dua orang dari sub bagian keuangan yaitu Kepala sub bagian keuangan dan staf. Hasil wawancara disajikan dalam bentuk transkrip wawancara yang kemudian dijadikan data dalam pengolahan data. Kemudian dokumentasi sebagai sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis yang memberikan informasi bagi proses penelitian.

Berikut daftar partisipan yang dijadikan informan dalam penelitian:

Tabel 2
Responden penelitian

Identitas Informan	Jabatan	Kode
AM	Kepala Bidang Akuntansi	KBA
EM	Kasie Pembukuan & Pelaporan	KPA
KH	Staf Pelaporan	SPA
MD	Kasubag Keuangan	KKDPK
CH	Staf Keuangan	SKDPK

Teknik analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dalam Sugiono (2010) setelah pengumpulan data, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk meyakinkan validitas data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan data dokumentasi, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

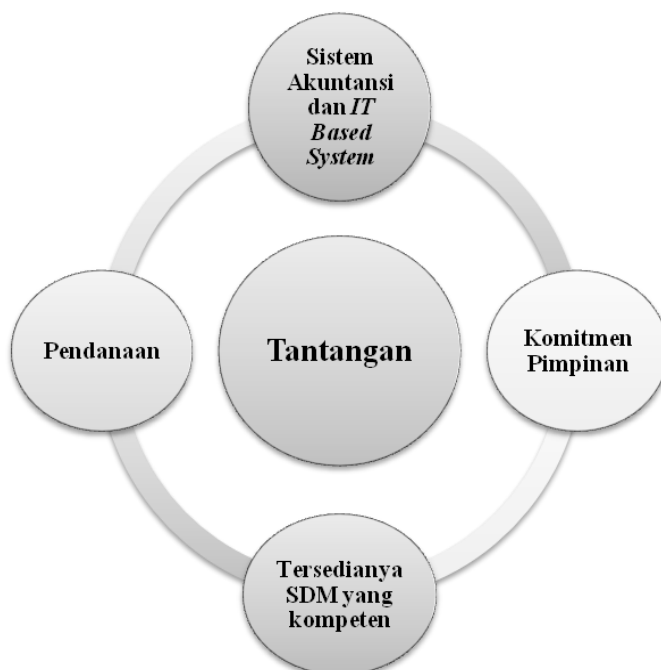
HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemda Aceh Tengah

Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah selain sebagai SKPD juga sebagai SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah), menjadi unit kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang melaksanakan dan bertanggung jawab akan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Sistem akuntansi dan pelaporan di Kabupaten Aceh Tengah yang awalnya berbasis *Cash Toward Accrual (CTA)*, dengan terbitnya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, diharuskan berubah menjadi sistem akuntansi berbasis akrual. Dengan berubahnya sistem akuntansi dari *Cash Toward Accrual (CTA)* menjadi berbasis akrual, kemungkinan akan ditemui permasalahan yang dihadapi. Penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dimulai pada tahun 2015, hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang memberikan batas waktu paling lambat bagi Pemerintah Daerah seluruh Indonesia untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015.

Tantangan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Tantangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemda Aceh Tengah

Tantangan penerapan akuntansi berbasis akruaI pada Pemda Aceh Tengah dapat dijelaskan, (1) Sistem Akuntansi dan *Information Technology (IT) Based System*, yaitu belum tersedianya sistem akuntansi dan sistem teknologi informasi yang mampu mengakomodasi persyaratan-persyaratan dalam penerapan akuntansi berbasis akruaI. Hal ini dapat diatasi Pemda Kabupaten Aceh Tengah dengan memakai aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), (2) Komitmen Pimpinan, dengan adanya komitmen dan dukungan politik dari pimpinan dan para pengambil keputusan karena dalam pemerintahan, dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya qanun atau Peraturan Bupati Aceh Tengah mengenai kebijakan dan sistem prosedur akuntansi berbasis akruaI, (3) Pendanaan, dalam pelaksanaan akruaI membutuhkan dana yang besar dan mencukupi tidak hanya untuk investasi awal tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pemeliharaan. Hal ini disebabkan penerapan basis akruaI membutuhkan pembaruan yang terus menerus sehingga tersedianya dana pemeliharaan pun menjadi mutlak. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah telah mengalokasikan anggaran untuk penerapan akuntansi berbasis akruaI setiap tahunnya, dan (4) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang memadai dalam menguasai akuntansi pemerintahan. Hal ini yang menjadi permasalahan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten baik itu berdasarkan latar belakang pendidikan maupun pengalaman. Sebagaimana dijelaskan pada wawancara Kasubbag Keuangan Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah:

“Ini yang jadi masalah karena di kita ini kan ada yang seharusnya dengan akruaI ini kan mesti SDM-nya yang akuntansi ya kan...diharapkan akuntansi latar belakang pendidikannya” (KKDPK)

Langkah Strategis Pemda Aceh Tengah dalam Mengatasi Permasalahan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI

Timbulnya permasalahan dalam penerapan akuntansi berbasis akruaI, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menggapai keberhasilan (*key succes factor*) dalam hal penerapan basis akruaI. Bahkan dari permasalahan ini juga harus dilakukan langkah strategis yang perlu diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pada Pemda Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah memiliki beberapa langkah strategis dalam mengatasi permasalahan penerapan akuntansi berbasis akrual.

Mengadakan pelatihan dan bimtek berjenjang.

Berjenjang yang dimaksud meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, dengan tujuan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan *skill* pelaksana, membangun kesadaran dan mengajak keterlibatan semua pihak. Pelatihan yang dilakukan yang pertama kali yaitu pelatihan akuntansi berbasis akrualnya kemudian pelatihan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Hal ini sesuai dengan wawancara Kasie Pembukuan dan Pelaporan Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah

“Ada...ada pelatihan...pertama untuk penerapan akuntansi berbasis akrual....yang kedua aplikasi SIMDA”(KPA)

Pelatihan aplikasi SIMDA diadakan oleh BPKP baik itu BPKP Banda Aceh maupun BPKP Pusat.

Pendanaan atau biaya.

Dalam rangka pelaksanaan akrual, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah membutuhkan dana yang besar dengan mempertimbangkan jumlah satuan kerja yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan melaksanakan pelatihan yang dibutuhkan untuk berbagai level. Implementasi basis akrual juga membutuhkan pendanaan yang cukup, tidak hanya untuk investasi awal tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pemeliharaan. Hal ini disebabkan penerapan basis akrual membutuhkan pembaruan yang terus menerus sehingga tersedianya dana pemeliharaan pun menjadi mutlak. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah telah mengalokasikan anggaran untuk penerapan akuntansi berbasis akrual setiap tahunnya berupa kegiatan yang terdapat di dalam DPA SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan sehingga pendanaan atau biaya tidak menjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Seperti yang telah disampaikan Kepala Bidang Akuntansi yang menyatakan bahwa:

“Pendanaan memang udah dianggarkan” (KBA),

dan didukung pemaparan staf Pembukuan dan Pelaporan:

“Sudah dianggarkan dan mencukupi...Memang sudah dianggarkan setiap tahunnya, berupa kegiatan di dalam DPA SKPD, sehingga untuk biaya tidak ada masalah” (SPA).

Teknologi informasi yang memadai.

Perubahan sistem akuntansi dalam entitas pemerintah selalu diikuti oleh perubahan teknologi informasi. Pada implementasi basis akruaI, sistem teknologi informasi (IT) juga harus diperbarui agar dapat menangani tambahan informasi terkait basis akruaI. Penggunaan *software* IT dapat mengadopsi *software* yang digunakan perusahaan komersial atau entitas pemerintah dapat merancang sistem IT sendiri untuk diaplikasikan. Adanya kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akruaI, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akruaI di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan *IT based system* yang lebih rumit. Untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akruaI pada Pemda Kabupaten Aceh Tengah, teknologi informasi yang diperlukan telah tersedia dan mendukung yaitu aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang *software* aplikasinya diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mengenai ketersediaan dukungan teknologi dan sistem informasi ini, berikut penuturan Kabid Akuntansi:

“mendukung...karena kita dibarengi dengan aplikasi SIMDA yang dikembangkan oleh BPKP” (KBA)

jawaban senada juga diperoleh dari wawancara staf Kasubag Keuangan:

“sangat mendukung dan tersedia” (SKDPK).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat diambil kesimpulan,yaitu dalam pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akruaI pada Pemda Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa mengadopsi sistem baru dalam sebuah entitas tidaklah mudah, diperlukan suatu proses yang harus ditempuh untuk merubah sistem yang ada dengan melakukan perubahan pada beberapa aspek. Kemudian pada pelaksanaannya ditemui permasalahan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai baik dari segi pengalaman maupun dari latar belakang pendidikan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah mengambil langkah strategis untuk mengatasi masalah atau kendala penerapan akuntansi berbasis akruaI ini, melalui: (1) pelatihan khusus, baik itu pelatihan yang diadakan oleh BPKP maupun oleh lembaga lain, (2) pendanaan/biaya yang sudah

dianggarkan dan mencukupi untuk penerapan akuntansi berbasis akrual, dan (3) teknologi dan Sistem Informasi yang mendukung dan mengakomodir penerapan basis akrual. Aplikasi yang digunakan yaitu SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), yang mana aplikasi ini diberikan oleh BPKP. Keterbatasan penelitian ini yaitu hanya meneliti permasalahan yang terjadi dalam penerapan akuntansi akrual pada Dinas Pengelolaan Keuangan, tidak melakukan penelitian pada beberapa SKPD yang berbeda di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian di lingkup pemerintah daerah yang lain untuk memperluas hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Asfiansyah, A. (2015). Strategi implementasi akuntansi akrual Pada Pemerintah Daerah (studi kasus pada pemerintah kota “s”). *Jurnal NeO-Bis*, 9(1), 1-19.
- Beechy, T.H. (2007). Does Full Accrual Accounting Enhance Accountability? *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*, 12(3), 1-18.
- Creswell, J.W. (2013). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). California . Sage Publication, Inc
- Halim, A., & Kusufi, M.S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Jakarta: Erlangga
- Hyndman, N., & Connolly, C. (2010). Accruals accounting in the public sector: A road not always taken. *Journal*, 22(2011), 36-45
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. *Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah*
- Priyono, N. (2012). Perkembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia Periode Sebelum Reformasi Sampai Dengan Pasca Reformasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Tidar Magelang*, 37(1), 1-13

Sari, D.P., & Putra, H.S. (2012). Menelisik Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Universitas Jember*, 11(2), 33-56.

Sancoko, B. (2008). Kajian terhadap Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Departemen Keuangan RI

Sugiyono Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Surepno. (2015). Kunci Sukses dan Peran Strategis Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2), 119-128

Widianti, H., Hadiyati, S.N., & Sulistyowati, D. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Akuntansi AkruaI pada Sektor Pemerintah. *Jurnal SENIT 2016*, 1(1), 155-162

Yafie, M.D. (2013). Penerapan Basis AkruaI pada Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 2(1), 1-24.

Yin, R.K. (2003). *“Introduction”*, in *Case Study Research*. London: SAGE Publications.